

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI secara proaktif telah berhasil mengimplementasikan dan menjalankan kegiatan manajemen isu “Pengesahan RUU TNI Menjadi UU” yang dianggap terlalu cepat dengan baik. Penelitian ini difokuskan pada peran Subbagian Analisis Media pada Biro Pemberitaan Parlemen sebagai pemeran utama dan dianalisis berdasarkan Teori Manajemen Isu oleh Howard Chase dan Barry Jones. Kegiatan Manajemen Isu yang dilakukan oleh Biro Pemberitaan Parlemen ini terbukti menjadi salah satu strategi proaktif yang dapat membantu DPR RI dalam mempertahankan dan memperbaiki reputasi ditengah dinamika informasi yang kompetitif dengan menunjukkan adanya kematangan dan struktur kerja yang jelas dalam setiap prosesnya.

Proses Manajemen Isu tersebut diantaranya yang pertama yaitu Tahap Identifikasi Isu yang dilakukan oleh Subbagian Analisis Media melalui *monitoring* multi-platform secara manual dan seemi otomatis (pada 12 media online dan 6 media cetak), yang nantinya akan didokumentasikan, dikategorisasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak, sehingga dapat menjadi bahan dalam membuat rekomendasi aktual. Kedua, Tahap Analisis Isu, yang mana pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian isu berdasarkan format yang telah ditentukan, hal ini dilakukan untuk mempermudah Analisis Media dalam membuat rekomendasi nantinya. Selanjutnya, untuk menjamin validitas data, draf analisis wajib melalui proses verifikasi silang (*crosscheck*) oleh Kepala Subbagian Analisis Media sebelum akhirnya diringkas menjadi laporan Ikhtisar Pemberitaan yang disebut *Executive Summary* dan dikirimkan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan (*stakeholder*).

Ketiga, Tahap Pilihan Strategi Perubahan Isu, merupakan tahap pengambilan keputusan/penentuan strategi program melalui diskusi, rapat redaksi bersama Pimpinan dan seluruh Biro Pemberitaan Parlemen atas hasil

analisis isu yang dibuat oleh Tim Analisis Media. Pada tahap ini diambil satu kesepakatan untuk memproduksi berbagai berita positif tentang DPR RI khususnya juga yang bersifat sosialisasi kepada publik terkait isu RUU TNI (kekhawatiran publik terkait dwifungsi militer dan lainnya tidak akan terjadi).

Keempat, Tahap Pemrograman Aksi Isu, yang mana pada tahap ini seluruh reporter dikirim untuk melakukan liputan langsung ke lapangan guna mendapatkan bahan pemberitaan pada setiap Bidang di Biro Pemberitaan Parlemen. Sehingga, luaran/output program dari setiap Bidang dapat dipublikasikan di media internal DPR RI dengan hasil yang berbeda-beda sesuai platform (berita di website, *reels/carousel* di Instagram, *short video* di youtube/tiktok dan facebook). Dan yang terakhir Tahap Evaluasi Hasil, pada tahap ini seluruh rangkaian proses diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur keberhasilan implementasi. Keberhasilan strategis program manajemen isu ini terbukti melalui penurunan kuantitas *tone* negatif di kanal pemberitaan pasca-program & komunikasi, yang mengindikasikan bahwa narasi yang seragam dan terkoordinasi berhasil meluruskan misinterpretasi dalam mempertahankan dan memperbaiki reputasi DPR RI di hadapan publik.

Sehingga, Subbagian Analisis Media disini berhasil menjalankan fungsinya sebagai kunci utama unit intelijen komunikasi, dimana mereka menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi DPR RI khususnya para *stakeholder* dengan melakukan *media monitoring* multi-platform secara intensif untuk mendeteksi *gap* (kesenjangan) antara kebijakan DPR RI dengan persepsi dan harapan publik, yang merupakan bibit awal potensi isu negatif. Efektivitas dari rangkaian proses manajemen isu tersebut telah teruji dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mitigasi isu kritis.

Meskipun demikian, dalam perjalanannya, implementasi manajemen isu ini tidak luput dari kompleksitas dan tantangan operasional yang bersifat struktural. Tantangan paling menonjol adalah keterbatasan akses komunikasi yang dimiliki Biro Pemberitaan Parlemen, khususnya oleh Subbagian Analisis Media, terhadap *stakeholder* utama, yaitu Pimpinan dan Anggota

Dewan. Hal ini secara praktis sering memicu terjadinya perbedaan persepsi, memunculkan perbedaan pendapat, yang secara tidak langsung menjadi pemicu munculnya masalah kepercayaan di kalangan *stakeholder* terhadap validitas dan urgensi analisis isu yang disajikan. Lebih lanjut, Biro Pemberitaan Parlemen menghadapi keterbatasan kewenangan eksekutorial, dimana mereka hanya bisa memberikan saran atau rekomendasi strategis, namun tidak memiliki otoritas formal untuk ‘meminta’ atau ‘mewajibkan’ Pimpinan dan Anggota Dewan untuk menindaklanjuti aksi yang direkomendasikan. Kondisi operasional yang menantang ini diperburuk oleh kecenderungan media eksternal yang menganut prinsip “*Bad News is a Good News*”, sehingga menciptakan lingkungan media yang sangat kompetitif dan menantang bagi upaya media internal DPR RI dalam menyeimbangkan narasi negatif.

Menariknya, hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut justru memicu transformasi organisasional dan pembelajaran proaktif di dalam tubuh DPR RI. Kesadaran akan perlunya sistem yang lebih tangguh telah mendorong Biro Pemberitaan Parlemen untuk merancang Protokol dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Perubahan ini juga disertai dengan adopsi filosofi operasional “*Everyday Is Crisis*” bagi tim krisis, yang bertujuan untuk menanamkan kesiapsiagaan operasional dan mental anggota internal dalam menghadapi krisis besar yang mungkin muncul mendadak tanpa terduga. Upaya untuk mengatasi kendala komunikasi dan *trust problem* diinternalisasikan melalui pembentukan grup koordinasi yang menghubungkan Tim Analisis Media dengan *stakeholder* (Pimpinan dan Anggota Dewan) secara langsung.

Upaya penyeimbangan narasi negatif di ruang publik juga diperkuat melalui penguatan Kerja Sama Wartawan Parlemen (KWP). Kemitraan ini memberikan akses liputan yang transparan bagi reporter eksternal untuk meliput kegiatan Rapat atau Konferensi Pers di lingkungan DPR RI. Kemitraan KWP ini secara efektif mendukung DPR RI dalam menyebarkan informasi kinerja anggota dewan dan kebijakan yang dikeluarkan secara lebih

faktual dan transparan, sekaligus memanfaatkan jangkauan luas media eksternal untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI berhasil mengukuhkan dirinya sebagai sistem pendukung komunikatif yang esensial bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun berhadapan dengan kompleksitas kelembagaan berupa hambatan akses dan keterbatasan kewenangan eksekutorial, unit ini menunjukkan adaptabilitas dan ketahanan yang tinggi. Mereka mampu mengubah tantangan menjadi inisiatif strategis yang proaktif, berujung pada penguatan sistem manajemen isu dan manajemen krisis lembaga secara keseluruhan. Keberhasilan ini menjadi refleksi atas komitmen DPR RI untuk menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan mampu mempertahankan kredibilitasnya di mata publik melalui pengelolaan isu yang terencana dan berbasis data.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Praktis

#### 1. Penguatan Interaksi *Stakeholder* dan Kepercayaan

Untuk menguatkan interaksi antara *stakeholder* dan tim, Biro PP diharapkan dapat mulai menunjuk LO untuk masing-masing AKD/Pimpinan dan untuk meningkatkan kepercayaan dapat melakukan *upgrade* terhadap sistem pengiriman hasil analisis (menjadi *streaming*).

#### 2. Peningkatan Kewenangan dan Respon Kelembagaan

Biro PP diharapkan dapat mem-formalisasi tim Krisis secara permanen untuk dapat siap dalam menghadapi krisis yang mungkin serupa kedepannya dan memperkuat (KWP) dengan memberikan akses informasi eksklusif kepada media eksternal terkemuka. Ini menjadi cara proaktif untuk menyeimbangkan narasi negatif tanpa konfrontasi langsung.

#### 3. Analisis *Framing* Narasi Penyeimbang

Melakukan *Framing Analysis* terhadap konten yang diproduksi oleh media internal DPR RI (TVR Parlemen, Media Sosial) untuk mengukur

efektivitas *framing* yang mereka gunakan dalam menetralsir atau menyeimbangkan *framing* negatif (prinsip "Bad News is a Good News") yang dominan di media eksternal.

### 5.2.2 Saran Teoritis

#### 1. Perumusan Model Manajemen Isu Legislatif Indonesia

Mendorong penelitian lanjutan yang bertujuan merumuskan Model Manajemen Isu khusus bagi lembaga legislatif. Model ini harus mengintegrasikan dan memperhitungkan variabel hambatan unik, seperti "Keterbatasan Kewenangan *Supporting System*" dan "Konflik *Trust* antara Analisis Birokrasi dan Aktor Politik".

#### 2. Pengukuran Kuantitatif *Trust* dan Kepatuhan

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metodologi kuantitatif untuk mengukur hubungan kausalitas antara kualitas dan akurasi analisis media Biro Pemberitaan dengan tingkat kepercayaan (*trust*) Pimpinan Dewan serta tingkat kepatuhan mereka terhadap rekomendasi aksi yang diberikan.